

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi

Faktor pendorong dalam pencapaian kompensasi kepemilikan rumah layak huni terdapat pada pemberian akses kerjasama antara Polri, pengembang dan perbankan. Rumah merupakan bentuk investasi jangka panjang dimana harga rumah setiap tahunnya akan meningkat, rumah juga memberikan rasa keamanan finansial untuk keluarga apalagi yang sudah memiliki anak dibandingkan dengan sewa, selain itu rumah juga dapat memberikan stabilitas dalam hal tempat tinggal sepanjang waktu. Ketika keuarga sudah berkembang, kebutuhan akan ruangan tambahan dapat mendorong seseorang akan membeli rumah yang lebih besar. Kepuasan memiliki rumah pribadi akan dirasakan setiap PNPP, mereka dapat melakukan perubahan dan peningkatan sesuai keinginan tanpa harus meminta izin kepada orang lain atau mengkhawatirkan perubahan sewa. Kepemilikan rumah sering dianggap sebagai status social yang lebih tinggi dan menjadi salah satu motivator PNPP lebih giat dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Memiliki rumah pribadi sangat berpengaruh terhadap biaya hidup setiap bulannya di bandingkan dengan sewa, secara logika rumah sewa akan mengeluarkan biaya yang besar setiap bulannya, baik biaya sewa, listrik, air maupun kebutuhan rumah lainnya. Faktor emosional seperti ikatan dengan lingkungan tertentu sangat membawa dampak yang baik dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Keputusan membeli rumah merupakan langkah penting berdasarkan situasi dan prioritas PNPP, pertimbangan yang cermat karena berhubungan dengan perencanaan keuangan pribadi PNPP.

Faktor penghambat pencapaian kompensasi kepemilikan rumah layak huni adalah pada regulasi yang belum jelas menyebut pemberian kompensasi terkait

pengadaan rumah pribadi bagi PNPP. Faktor lain secara umum yang menghambat pembelian rumah pribadi adalah harga properti yang tinggi, dengan keterbatasan gaji PNPP kesulitan untuk memenuhi pembayaran awal, PUM KPR yang disiapkan oleh PT. Asabri belum sepenuhnya bisa memenuhi untuk membayar uang muka. Kerjasama dengan perbankan juga belum diterima manfaatnya, proses pengajuan mungkin bisa saja dibantu dengan mudah oleh perbankan, akan tetapi suku bunga tinggi tidak mudah diturunkan oleh pihak Bank. Pendapatan yang PNPP yang masuk dalam Masyarakat berpenghasilan rendah membuat PNPP kesulitan membayar kredit tiap bulannya apalagi ditambah perekonomian yang tidak stabil. Kehidupan PNPP dengan pangkat tertentu yang selalu berpindah-pindah tugas menjadi berkurangnya faktor minat untuk memiliki rumah. Berikut uraian faktor kompensasi:

- a. Kompensasi harus mencukupi, untuk memungkinkan PNPP membeli rumah yang sesuai dengan tingkat gaji dan kondisi ekonomi mereka. Ini berarti bahwa kompensasi perumahan harus mempertimbangkan perbedaan harga properti di berbagai lokasi dan tingkat gaji PNPP.
- b. Kompensasi perumahan harus sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebijakan pemerintah, harus diperlakukan secara adil dalam hal kepemilikan rumah layak huni, tanpa diskriminasi atau ketidaksetaraan serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
- c. Program PUM KPR yang disiapkan oleh PT. Asabri belum sepenuhnya bisa memenuhi untuk membayar uang muka, pengusulan PUM KPR yang seluruhnya belum bisa direalisasikan oleh PT. Asabri.

2. Strategi kompensasi

Penerapan strategi yang di hasilkan oleh peneliti memerlukan peran pimpinan Polri dalam memberikan kebijakan dan penerbitan aturan terkait pemenuhan hak-hak PNPP dalam kepemilikan rumah layak huni demi kesejahteraan PNPP. Perubahan aturan tersebut di usulkan terlebih dahulu oleh

Satuan Kerja itu sendiri yang dilanjutkan dengan pembahasan oleh tim pokja dari SSDM Polri, Divkum Polri dan dilanjut ke Kemenkumham. Perlu dilakukan penyusunan anggaran secara ketat dan disiplin bekerja sama dengan satuan kerja Staf Perencanaan (Srena Polri), Pusat Keuangan Polri (Puskeu Polri) dan Kementerian Keuangan maupun Kemenpan RB, supaya penyiapan anggaran dapat dialokasikan dengan baik kepada PNPP. Kolaborasi lintas sektoral antara Polri, pengembang dan perbankan merupakan kerjasama yang baik, terkait kemudahan PNPP untuk memiliki rumah yang tujuannya agar diringankan suku bunga kredit dan dimudahkan akses atau lokasi rumah dengan kantor. Berikut kesimpulan strategi kompensasi:

- a. Perubahan aturan terkait pemberian hak-hak PNPP guna mengakomodir kompensasi kepemilikan rumah pribadi harus dilakukan dan semua perlu peran serta Pimpinan Polri supaya tujuan peningkatan kesejahteraan PNPP segera terpenuhi.
- b. Kolaborasi lintas sektoral tiga pilar yang tercantum pada Perkap No. 2 Th.2020 antara Polri, pengembang dan perbankan, memiliki peluang PNPP mendapatkan perumahan terjangkau dan pembiayaan yg kompetitif

B. Saran

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi
 - a. Polri, dalam hal ini Staf Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena Polri) perlu mempertimbangkan peningkatan gaji atau tunjangan khusus bagi PNPP untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan perumahan, supaya keinginan membeli rumah sesuai dengan tingkat gaji dan kondisi ekonomi mereka, dengan mempertimbangkan perbedaan harga properti di berbagai lokasi.
 - b. Polri harus bisa memberikan rasa adil kepada PNPP terkait dengan anggaran yang tersedia dalam hal kepemilikan rumah layak huni, tanpa

diskriminasi atau ketidaksetaraan dan pergunaan anggaran secara efektif dan efisien.

- c. SSDM Polri selaku pembantu tugas Kapolri agar dapat mengkoordinasikan kembali pada PT Asabri, supaya setiap pengusulan PUM KPR sepenuhnya bisa dicairkan, tidak lagi berdasarkan kuota dan lanjutkan program PUM KPR ini untuk membantu PNPP mendapatkan kemudahan dalam hal tambahan uang muka.

2. Strategi kompensasi

- a. Agar SSDM Polri bekerjasama dengan Divkum Polri melakukan revisi atau perubahan aturan terkait pemberian hak-hak PNPP yang mengakomodir kompensasi kepemilikan rumah pribadi, serta di kawal prosesnya sampai ke Kemenkumham.
- b. Agar SSDM Polri bekerjasama dengan Staf Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena Polri) dan Pusat Keuangan Polri (Puskeu Polri) melakukan penyusunan anggaran secara ketat dan disiplin, dalam rangka penyiapan anggaran yang dialokasikan untuk PNPP dalam kepemilikan rumah layak huni kepada Kementerian Keuangan maupun Kemenpan RB.
- c. Agar Polri, dalam hal ini SSDM Polri memaksimalkan kolaborasi lintas sektoral atau kerjasama tiga pilar antara Polri dengan pengembang dan perbankan dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan (Polda), sebagai bentuk kemudahan PNPP untuk mendapatkan hak-hak dalam kepemilikan rumah layak huni dan sebagai program jangka Panjang Polri dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh PNPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan dan Yudi Rusliana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Alhabisy, Muhammad Yuda, (2019), Analisis Model Kelembagaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), *Jurnal Semarak*, 2 (1): 85-96
- Anoraga, Panji. (2001). Psikologi Kerja. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ardianto, Wahyu. Program Sejuta Rumah Jadi Andalan Untuk Kurangi Backlog, Efektif?, <https://www.rumah.com/berita-properti/2022/8/206084/program-sejuta-rumah-jadi-andalan-untuk-kurangi-backlog-efektif>, diakses pada tanggal 27 November 2022
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi, (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka
- Batjo, Nurhadi. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Makasar: Aksara Timur.
- Bintarto. 1989. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Campbell, D. (2008). Nonfinancial Performance Measures and Promotion Based Incentives. *Journal of Accounting Research* , pp. 297-332.
- Chandra, Riny. (2017). Pengaruh Lingkungan dan Kesejahteraan terhadap Etos Kerja Karyawan PTPN 1 Pulau Tiga di Aceh Tamiang. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 6 (2)
- Chukwuma, E.M., & Obiefuna, O. (2014). Effect of Motivation on EmployeeProductivity : A Study of Manufacturing Companies in Nnewi. *Journal of Managerial Studies and Research* 2 (7).
- Creswell, John W, (2017), *Research Design*. New York: Sage Publications

- Dessler, G. (2008). Human Resource Management (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Dharma, Agus. (2006). *Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis Bagi Supervisor*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Dirjen Anggaran Kemenkeu, (2015) *Peranan ABPN dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Jakarta: Dirjen Anggaran Kemenkeu
- Dunn, William, (2013), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 25
- Elbadiansyah. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: CV IRDH.
- Fahrudin, Adi. (2018). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Handoko, T. Hani. (2001). Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Harsono, J dan Santoso, S. (2006). Etos Kerja Pengusaha Muslim Perkotaan di Kota Ponorogo. Jurnal Penelitian Humaniora Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Edisi Khusus
- Hasan, M. Iqbal, (2002), *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Hasibuan, Malayu S P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Dasar Dan Kunci Keberhasilan)*. Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. (2010) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Heidjrachman & Husnan, S. (1997). Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPFE.
- Indrianingrum, Lulut, (2016), Rencana Kepemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah: Studi Kasus Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang, *Jurnal Teknik Sipil Perencanaan*, 18 (1): 15-20
- Irsan, dkk. (2012). Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis PMIS UNTAN-IAN.

- Jauhari, Ahmad Rifqi dan Asnawi Manaf, (2014) Tingkat Keterjangkauan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berpenghasilan Rendah terhadap Perumahan Formal di Kota Semarang (Studi Kasus: Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di Universitas Diponegoro), *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10 (2): 153-165
- Jones, O. Charles. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy. Third Edition.* California: Brooks/Cole Publishing Company
- Kurniati, Nia, dkk., (2021), Program Perumahan Rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang Tidak Layak Huni, *Acta Diurnal*, 5 (1): 95-106
- Larasati, Sri. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Deepublish.
- Leks, Edi Marek, (2013), *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Perumahan Rakyat*, Jakarta: BPHN Kemenkumham
- Mangkuprawira, S. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardawani, (2020), *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Moleong, Lexy J., (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali, (2003), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung
- Nasikun. (2004). Sistem Sosial Indonesia: Jakarta: RajaGrafindo
- Nawasi, Hadari. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Nugroho D, Riant, (2004), *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia

- Nur, Muhammad Tahmid. (2015). Kompensasi Kerja Dalam Islam. *Jurnal Muamalah*, Vol 2 No 2 (2015). 122.
- Pamela, A.O., & Oloko (2015). Effect of motivation on employee performance of commercial banks in kenya : A case study of Kenya Commercial Bank in Migori County. *Journal of Human Resource Studies* 5 (2).
- Pampanga, Dario G. dkk. (2014). Compliance of Balanced Housing Policy in the Philippines: The Case of Davao City. International Conference on Urban and Regional Planning.
- Poerwandari, E.K., (2005), *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia* (edisi ketiga), Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi UI
- Puspita, Diana D, dkk. (2022). Divergence in Implementation of Public Housing SavingvProgram: A Comparative Analysis of Indonesia,vSingapore and Japan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* (BIRCI-Journal), 5 (2): 8910-8920
- Reforms: An Overview. Viesoji Politika Ir Adminitravimas Public Policy and Administration, 21 (1)
- Roestamy, Martin. (2017). Providing Affordable Housing for Low Income People in Indonesia. *IJASOS-International E-Journal of Advantage of Social Science*. 3 (9)
- Sastrohadiwiryo, S. (2002). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif & Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetrisno, Edy. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Sofyandi, H. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Stumpf, A. S. & L. M.(1981). Management Promotions: Individual and Organizational Factors Influencing the Decision Process. *Journal of Management*, Vol. 6, No.4, pp. 539-549.
- Subagyo, Joko, (2006), *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

- Subarsono, (2005), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudaryo dkk, Yoyo. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Langsung Dan Tidak Langsung Lingkungan Kerja Fisik*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono, (2005), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabeta
- Sukriyanto. (2000) Etos Kerja Salah Satu Faktor Survivalitas Peternak Sapi Perah (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. *Tesis. Progam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang*
- Sururi, Ahmad, dkk. (2022). Housing Policy for Low-Income Communities in Indonesia and Its
- Tasmara, Toto. (2002). Membudayakan Etos Kerja Islami. Jakarta: Gema Insani
- Tim Peneliti PKSK, Kebijakan Skema Penyediaan Perumahan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Prajurit TNI/Polri,<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/11/04/094053854418728-kebijakan-skema-penyediaan-perumahan-bagi-aparatur-sipil-negara ASN-dan-prajurit-tnipolri>, diakses 27 November 2022
- Tjahyono, Frans, dkk. (2023). Studi Penguatan Kebijakan Program Perumahan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri pada Polri. *Jurnal Litbang Polri*. 26 (1)
- Torrington, D. & Hall, L. (1991). Personnal Management. Libraires Australia: Prentice Hall.
- Triyanto, Agus. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. *Tugas Akhir*. Universitas Terbuka
- Wahyudi, B. (1991). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: BPFE.

- Werther, J. W. B. & Davis, K. (1996). Human Resources and Personal Management. New York: McGraw-Hill Inc..
- Wibisono, Eko, dkk, 2014, Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Studi Kasus Kabupaten Bogor, *Tesis*, Universitas Indonesia
- Wursanto. (2009). Dasar-dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi Offset
- Zamri, Nor Ezatie Mukminah Muhammad and Mahazril ‘Aini Yaacob. (2021). Assessing housing preferences of young civil servants in Malaysia: do location, financial capability and neighbourhood really matter?. International Journal of Housing Markets and Analysis. Juni 2021.